

1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan (Bobot Urusan : 5%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD  ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kota Pontianak	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini</p> <p>7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	berwenang			
2.	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kota Pontianak	25%
3.	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kota Pontianak	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p data-bbox="620 288 1093 491">jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p data-bbox="545 512 1093 655">6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p data-bbox="545 676 1093 820">7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p data-bbox="545 841 1093 943">8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p data-bbox="545 963 1093 1107">9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p data-bbox="545 1128 1093 1287">10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p data-bbox="545 1308 1093 1342">11. jumlah kebutuhan minimal</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
4.	<p>1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p>	<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p>	<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota Pontianak</p>	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			
6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			
7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1			



b) Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	Jumlah RS Rujukan Kota Pontianak yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kota Pontianak}} \times 100 \%$	7%
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota Pontianak yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kota Pontianak}} \times 100 \%$	7%
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia</li> <li>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal</li> </ol>	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kota Pontianak}} \times 100 \%$	7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kota Pontianak}} \times 100 \%$	7%
5.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kota Pontianak}} \times 100 \%$	7%
6.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kota Pontianak}} \times 100 \%$	7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
7.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Pontianak	7%
8.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Pontianak	7%
9.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota Pontianak	7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
10.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kota Pontianak	7%
11.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kota Pontianak	7%
12.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kota Pontianak	7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
13.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kota Pontianak	7%
14.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Pontianak	7%

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota Pontianak (ha)</p> <p>2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kota Pontianak (m)</p> <p>3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kota Pontianak (HA)</p>	<p>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Pontianak</p> <p>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Pontianak</p>	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Pontianak (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota Pontianak (ha)</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Pontianak (m)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman</p>	10%
2.	<p>4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kota Pontianak (ha)</p>			10%

	<p>5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan Kota Pontianak</p> <p>6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kota Pontianak</p> <p>7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kota Pontianak</p>		<p>sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Pontianak (m)</p>	
3.	<p>1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik</p> <p>2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik</p> <p>3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik</p>	<p>Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Pontianak yang dilayani oleh jaringan irigasi</p>	<p>Luas irigasi kewenangan Kota Pontianak yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting</p> <p>----- x 100 %</p> <p>luas daerah irigasi kewenangan Kota Pontianak</p>	10%

4.	<p>1. Penetapan dokumen RISPAM Kota Pontianak (Ada /Tidak)</p> <p>2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kota Pontianak (Ada/Tidak)</p> <p>3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kota Pontianak Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)</p> <p>4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM</p> <p>5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota Pontianak</p>	<p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kota Pontianak.</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlahtotal proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Pontianak tersebut.</p>	20%
----	---	--	---	-----



5.	<p>1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S</p> <p>2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T</p> <p>3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</p>	<p>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p>	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah rumah di Kota Pontianak</p>	20%
----	---	--	---	-----

	<p>4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja</p> <p>5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja</p> <p>6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik</p> <p>7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</p> <p>8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman</p> <p>9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman</p>			
--	---	--	--	--

	<p>10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat</p> <p>11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja</p> <p>12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</p> <p>13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD</p> <p>14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja</p>			
6.	<p>1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi</p> <p>2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam tahun eksisting</p>	<p>Rasio kepatuhan IMB Kota Pontianak</p>	<p>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah IMB yang berlaku</p>	10%

	<p>3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</p> <p>4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</p> <p>5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan</p> <p>6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota Pontianak untuk kepentingan strategis daerah provinsi</p> <p>7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota Pontianak</p>			
--	--	--	--	--

	8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kota Pontianak yang dipelihara/dirawat			
7.	<p>1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kota Pontianak</p> <p>2. Panjang jalan yang dibangun</p> <p>3. Panjang jembatan yang dibangun</p> <p>4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)</p> <p>5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan</p> <p>6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi</p> <p>7. Panjang jembatan yang direhabilitasi</p>	Tingkat Kemantapan Jalan Kota Pontianak	<p>Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total panjang jalan Kota Pontianak</p>	10%

	<p>8. Panjang jalan yang dipelihara</p> <p>9. Panjang jembatan yang dipelihara</p>			
8.	<p>1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kota Pontianak</p> <p>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Pontianak</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kota Pontianak</p> <p>4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kota Pontianak yang aktif dengan data termutakhir</p>	<p>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</p>	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Pontianak yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Pontianak</p>	10%

	<p>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Pontianak untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak</p> <p>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Pontianak untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN</p> <p>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Pontianak untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</p>			
--	--	--	--	--

	<p>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala</p> <p>9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota Pontianak</p> <p>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kota Pontianak yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang</p>			
--	--	--	--	--



	<p>diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Pontianak yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Pontianak</p>			
--	--	--	--	--

	<p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota Pontianak</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>			
--	--	--	--	--

	<p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kota Pontianak</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kota Pontianak</p>			
--	--	--	--	--

	<p>20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kota Pontianak</p> <p>21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota Pontianak</p> <p>22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>			
--	---	--	--	--

	<p>24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>			
		<p>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</p>	<p>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi  ----- x 100 %  Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>	

d) Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya</p> <p>2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam</p> <p>3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam</p> <p>4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi</p> <p>6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun</p>	<p>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana</p> <p>Kota Pontianak</p>	<p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</p>	20%

	<p>baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana</p> <p>8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi</p> <p>9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan</p>			
2.	<p>1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan</p>	<p>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Pontianak</p>	<p>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total rumah tangga</p>	20%

	<p>fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana</p>		<p>terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p>	
--	---	--	---	--



	<p>memenuhi SPM</p> <p>6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah</p>			
3.	<p>1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh &lt; 10 Ha</p> <p>2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH</p> <p>3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh</p>	<p>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Pontianak yang ditangani</p>	<p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</p>	20%
4.	<p>1. Jumlah rumah di Kota Pontianak</p> <p>2. Jumlah unit PK RTLH</p> <p>3. Jumlah rumah tidak layak huni</p> <p>4. Jumlah rumah yang tidak dihuni</p> <p>5. Rasio rumah dan KK</p> <p>6. Jumlah rumah pembangunan baru</p>	<p>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</p>	<p>Jumlah unit rumah tidak layak huni</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total unit rumah Kota Pontianak</p>	20%

5.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU</li> <li>2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum</li> <li>3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan</li> <li>4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)</li> <li>5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH</li> <li>6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU</li> <li>7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi</li> <li>8. Jumlah pengembang yang terregistrasi</li> <li>9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan</li> </ol>	<p>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</p>	<p>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah unit rumah Kota Pontianak</p>	20%
----	--	---	--	-----

e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kota Pontianak yang ditangani</p> <p>2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan</p> <p>3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</p> <p>4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</p> <p>5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum</p> <p>6. Tersedianya sarana prasarana minimal</p>	<p>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</p>	<p>Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</p>	14%
2.		<p>Persentase Perda dan Perkada yang</p>	<p>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</p>	14%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		ditegakkan	----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi	
3.	<p>1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal</p> <p>2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14%
4.	<p>1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal</p> <p>2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal</p> <p>3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</p>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan</p>			
5.	<p>1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB</p> <p>2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana</p>	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	14%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana</p>			
6.	<p>1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Pontianak</p> <p>2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar,</p>	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Pontianak dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Pontianak dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk	14%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan</p> <p>3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan</p> <p>4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa</p> <p>5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud</p>		<p>dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di Kota Pontianak</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran</p> <p>7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran</p> <p>8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran</p>			
7.		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, persiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14%



f) Sosial (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dimiliki			
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			
7.	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu</p> <p>10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter</p> <p>11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia</p> <p>12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan</p> <p>13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah</p> <p>14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>dan/atau relawan sosial yang disediakan</p> <p>15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial</p> <p>16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat</p> <p>17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan</p> <p>18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga</p> <p>20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk</p>			
2.	<p>1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan</p> <p>2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang</p> <p>3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki</p>	<p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Pontianak</p>	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota Pontianak yang membutuhkan perlindungan dan</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan</p> <p>5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial</p> <p>6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</p>		<p>jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Pontianak</p>	

2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja (Bobot Urusan : 3%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kota Pontianak.</p> <p>2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.</p> <p>3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kota Pontianak.</p>	<p>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</p>	<p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Pontianak</p>	
2.	<p>1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster</p> <p>2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi</p> <p>3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan</p> <p>4. Persentase LPK yang terakreditasi</p> <p>5. Persentase LPK yang memiliki perizinan</p>	<p>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</p>	25%



	<p>6. Jumlah penganggur yang dilatih</p> <p>7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan</p> <p>8. Persentase penyerapan lulusan</p> <p>9. Lulusan bersertifikat kompetensi</p> <p>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan</p> <p>11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</p>			
3.	<p>1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas</p> <p>2. Data tingkat produktivitas total</p> <p>3.</p>	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	<p>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah tenaga kerja</p>	25%

4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)</li> <li>2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</li> <li>3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan</li> <li>4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.</li> <li>5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan</li> </ol>	<p>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).</p>	<p>Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Perusahaan</p>	25%
----	---	--	--	-----

	<p>6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih</p> <p>7. Jumlah mogok kerja</p> <p>8. Jumlah penutupan perusahaan</p> <p>9. Jumlah perselisihan kepentingan</p> <p>10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan</p> <p>11. Jumlah perselisihan PHK</p> <p>12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK</p> <p>13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite</p> <p>14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Pontianak yang diberdayakan</p>			
--	--	--	--	--

	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
5.	<p>1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kota Pontianak</p> <p>2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kota Pontianak</p> <p>3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kota Pontianak</p> <p>4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kota Pontianak</p> <p>5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja</p> <p>6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja</p>	<p>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Pontianak</p>	<p>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100%</p> <p>Jumlah pencaker yang terdaftar</p>	25%

	<p>Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kota Pontianak</p> <p>7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kota Pontianak.</p> <p>8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)</p> <p>9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi</p> <p>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata</p>			
--	---	--	--	--

	<p>11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan</p> <p>12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</p> <p>13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya</p> <p>14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk</p>			
--	--	--	--	--

g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kota Pontianak yang telah dilatih PUG</p> <p>2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kota Pontianak</p>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	<p>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh belanja langsung APBD</p>	33%
2.	<p>1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemKota Pontianak (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak</p> <p>2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</p>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota Pontianak	<p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota Pontianak yang didampingi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)</p>	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani</p> <p>4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan</p> <p>5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemKota Pontianak (APBD Kota Pontianak)</p>			
3.	<p>1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kota Pontianak yang mendapatkan pelatihan</p> <p>2. Jumlah kader perempuan tingkat Kota Pontianak</p>	<p>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</p>	<p>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan</p>	33%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>yang sudah dilatih</p> <p>3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</p> <p>4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kota Pontianak</p> <p>5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi</p> <p>6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			

h) Pangan (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan</p> <p>2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya</p> <p>3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan</p>	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p data-bbox="620 288 1093 435">konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang</p> <p data-bbox="568 459 1093 547">5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan</p> <p data-bbox="568 571 1093 659">6. Tertanganinya kerawanan pangan</p> <p data-bbox="568 683 1093 834">7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan</p> <p data-bbox="568 858 1093 946">8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar</p>			

i) Pertanahan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	
2.	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
3.	4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	Kota Pontianak		----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	
4.		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	
5.		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	
6.		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100%	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		mediasi	jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	

j) Lingkungan Hidup(Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Hasil perhitungan Kota Pontianak terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pontianak		33%
2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kota Pontianak	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Pontianak	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total vol timbunan sampah Kota Pontianak	33%
3.	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>pemerintah daerah Kota Pontianak</p> <p>2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kota Pontianak terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Pontianak</p> <p>3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kota Pontianak</p> <p>4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH</p> <p>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat</p>	<p>kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak</p>	<p>melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Pontianak</p> <p>----- x 100%</p> <p>usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Pontianak yang ditangani.			

k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	25%
2.		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	25%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	25%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD	25%

1) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	50%
2.		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>dan diberdayakan</p> <p>4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan</p>		<p>per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)</p>	

m) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan</p> <p>2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun</p> <p>3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age</p>	TFR (Angka Kelahiran Total)		33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</p> <p>4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</p> <p>5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</p>			
2.	<p>1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP</p> <p>2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p>	<p>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</p>	<p>Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur</p>	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	3. Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan			
3.	1. Persentase kesertaan KB di Kota Pontianak dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	33%

n) Perhubungan (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Rasio konektivitas Kota Pontianak	Rasio konektivitas Kota Pontianak = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>2. Terlaksananya pelayanan uji berkala</p> <p>3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota, dalam kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</p> <p>4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota Pontianak</p>		<p>penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota Pontianak x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kota Pontianak tersebut)</li> <li>○ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota Pontianak tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kota Pontianak tersebut)</li> </ul> <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil</li> <li>- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik</li> </ul>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<p>lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</li> <li>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan</li> </ol>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<p>dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot = 1</p>	



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>	
2.		Kinerja lalu lintas Kota Pontianak	V/C Ratio di Jalan Kota Pontianak	50%

o) Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<p>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah OPD</p>	35%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</p> <p>3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</p>			
3.	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<p>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Layanan Publik</p>	35%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> <p>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah			
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)			
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai			
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city			
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo			
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	kepala daerah terkait implementasi e-government			
3	<p>4. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kota Pontianak yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kota Pontianak</p> <p>5. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</p> <p>6. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan</p>	<p>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Pontianak</p>	<p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Pontianak</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah penduduk</p>	30%

p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam</p>	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	<p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh koperasi</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>daerah Kota Pontianak</p> <p>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p>			



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</p> <p>9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak</p> <p>13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pontianak			
2.	<p>1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro</p> <p>2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)</p> <p>3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra</p> <p>4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</p> <p>5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan</p>	<p>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha</p>	<p>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan			

q) Penanaman Modal (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota Pontianak 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian	Persentase peningkatan investasi di Kota Pontianak	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1} \times 100\%$ di Kota Pontianak	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>fasilitas insentif penanaman modal</p> <p>3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal</p> <p>4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting</p> <p>5. Kegiatan pameran penanaman modal</p> <p>6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal</p> <p>7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal</p> <p>8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</p> <p>9. Laporan realisasi penanaman modal</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kota Pontianak			
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan Kota Pontianak			

r) Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Pontianak ----- x 100%	33%
	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Pontianak	
2.	1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda</p> <p>2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan</p>	<p>organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</p>	<p>organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Pontianak</p> <p>----- x 100%</p> <p>jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Pontianak</p>	
3.	<p>1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan</p> <p>2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah</p>	<p>Peningkatan prestasi olahraga</p>	<p>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</p>	33%

s) Statistik (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya buku profil daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah  ----- x 100% jumlah OPD	50%
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan			
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			
	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah  ----- x 100% jumlah OPD	50%
	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik			
	7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik			



t) Persandian (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan</p> <p>2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p> <p>3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan</p>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<p>Jumlah nilai per area keamanan informasi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah area penilaian</p>	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>resiko kategori rendah</p> <p>4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</p>			

u) Kebudayaan(Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)</p> <p>2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang</p>	Terlestarikannya Cagar Budaya	<p>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah cagar budaya yang terdata</p>	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)</p> <p>3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)</p> <p>4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)</p> <p>5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)</p> <p>6. Perlindungan cagar budaya Kota Pontianak (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran</p> <p>7. Layanan perizinan membawa cagar budaya Kota Pontianak ke luar Kota dengan dukungan data</p> <p>8. Pengembangan cagar budaya Kota Pontianak (penelitian, revitalisasi, adaptasi)</p> <p>9. Pemanfaatan cagar budaya Kota Pontianak (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			
	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan			
	12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum Kota Pontianak			
	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya			
	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kota Pontianak			
	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			
	16. Pemetaan sdm cagar budaya			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>dan permuseuman</p> <p>17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman Kota Pontianak</p> <p>18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman</p> <p>19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat</p>			

v) Perpustakaan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		50%
	2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh	2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>masyarakat</p> <p>3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk</p> <p>4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</p> <p>5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat</p>			
2.	<p>1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya</p> <p>2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa</p> <p>3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			

w) Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j) / 4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip	50%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	
2.	<p>1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</p> <p>2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK</p> <p>3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kota Pontianak yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kota Pontianak yang sesuai NSPK di Kota Pontianak</p> <p>4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kota Pontianak yang sesuai NSPK</p> <p>5. Pencarian arsip statis yang</p>	<p>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</p>	<p><math>T = (m + b + g + a + c + i) / 6</math></p> <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Kota Pontianak yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kota Pontianak yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK</p> <p>6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kota Pontianak yang sesuai NSPK</p>		<p>Kota Pontianak dengan NSPK</p> <p>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	

3) Urusan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)</p> <p>2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional</p> <p>3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota Pontianak yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan</p>	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota Pontianak (sumber data: one data KKP)</p>	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota Pontianak (sumber data: one data KKP)</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			

b) Pariwisata (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	20%
2.	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kota Pontianak	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	ke Kota Pontianak	Jumlah wisatawan tahun n-1	
3.	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	20%
4.	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kota Pontianak	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	20%
5.	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20%
	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi			
	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			

c) Pertanian (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kota Pontianak	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \times 100\%$	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	50%

d) Kehutanan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			

e) Energi dan Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kota Pontianak	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kota Pontianak	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	100%

f) Perdagangan (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat perbelanjaan</li> <li>b. Toko swalayan</li> </ol> </li> <li>2. Persentase penerbitan TDG</li> <li>3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG</li> <li>4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</li> <li>5. Persentase pemeriksaan</li> </ol>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kota Pontianak}} \times 100\%$	33%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kota Pontianak</p> <p>6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu</p> <p>7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>8. Persentase koefisien variasi</p>			
2.	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	33%
3.	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{-----}} \times 100\%$	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	bertanda tera sah yang berlaku	jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kota Pontianak	

g) Perindustrian (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kota Pontianak	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Pontianak	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	17%
2.	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator		17%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		
3.	<p>1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan</p> <p>2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan</p>	<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	17%
4.		<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	17%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Pontianak	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	17%
6.	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kota Pontianak yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di Kota Pontianak	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong Informasi bahan bakar/ energy Informasi tenaga kerja	17%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			Informasi investasi	

h) Transmigrasi (Bobot Urusan : 1%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina			

4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Bobot : 10%)

a) Perencanaan dan Keuangan (Bobot Urusan : 30%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100 \%$	16.7%
2.		Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD non migas}} \times 100\%$	16.7%
3.		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	16.7%
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	16.7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD	16.7%
5.		Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	16.7%

b) Pengadaan (Bobot Urusan : 10%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	33%
2.		Persentase jumlah pengadaan yang	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		dilakukan dengan metode kompetitif	----- X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	
3.		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung	33%

c) Kepegawaian (Bobot Urusan : 20%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	33%
2.		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100%	33%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	
3.		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33%

d) Manajemen Keuangan (Bobot Urusan : 20%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu	25%
2.		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.		Manajemen Aset	<p>1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)</p> <p>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)</p> <p>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)</p> <p>Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)</p>	25%
4.		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	<p>Nilai realisasi SiLPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya</p>	25%

e) Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urusan : 20%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$	50%
2.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$	50%

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO